

Memerangi Gizi Buruk, Tempatkan Masyarakat Sebagai Subyek Perubahan *)

Gizi buruk, terus-terang, bukanlah topik yang seksi. Bagi media massa dan apalagi buat pemerintah. Media massa hanya sesekali mengungkap fenomena gizi buruk bila muncul di kejadian luar biasa. Sementara bagi pemerintah, pemberitaan gizi buruk adalah sebuah aib. Bahwa pemerintah tak sanggup menjaga kesejahteraan rakyat pada tahap paling minimal.

Secara khusus saya akan mencoba mengupas persoalan gizi buruk dari tiga sudut pandang, yakni dari media, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Tiga lembaga yang menjadi unsur penting dalam upaya penanganan masalah gizi buruk.

Selain berdasar pengalaman saya sebagai Redaktur Kesehatan di Majalah Tempo, ulasan ini juga berdasar pengamatan saya selama menjadi relawan di beberapa daerah bencana yang harus bersentuhan baik dengan media, pemerintah, dan LSM.

Media

Ada segunung masalah di negeri ini. Korupsi, skandal politik, pendidikan yang amburadul, pat-gulipat penegakan hukum, wabah berbagai penyakit, tak pernah berhenti terjadi. Di tengah gejolak seperti ini, gizi buruk hampir selalu dianggap sebagai topik yang kurang bernilai berita. Dia kalah bersaing dengan topik-topik panas lain, umpamanya korupsi di Jamsostek, flu burung, banjir, untuk diangkat secara konsisten di media massa.

Gizi buruk baru dianggap seksi apabila telah mencapai tahap kritis di suatu wilayah. Misalnya, ada puluhan korban meninggal, sekarat dalam kondisi mengenaskan. Kasus ini juga menarik bagi media jika ditemukan indikasi korupsi pengadaan pangan di dalamnya. Yang juga menarik adalah jika kasus gizi buruk terjadi di kota besar, misalnya Jakarta, yang mewakili sebuah ironi. Bahkan di ibu kota, tempat 70 persen uang di negeri ini beredar, masih terjadi kasus gizi buruk. Tentu ini sebuah cermin kegagalan pemerintah yang layak disoroti.

Lain soal apabila gizi buruk belum mencapai tahap yang dramatis. Media mungkin masih mendiarkannya dan lebih memilih persoalan lain yang lebih panas. Padahal, jangkauan dampak persoalan gizi buruk di lapangan juga tak kalah merisaukan.

Awal tahun 2007, Departemen Kesehatan melaporkan ada 1,7 juta balita yang berstatus gizi buruk tersebar di seluruh Indonesia. Depkes juga memperkirakan ada 5 dari 18 juta balita di negeri ini yang berstatus gizi kurang. Mereka inilah, para balita yang sebetulnya sedang dalam masa emas pertumbuhan, yang terancam bakal kehilangan masa depan sebagai 'generasi yang hilang'.

Mengingat dampak yang luar biasa bagi bangsa kita di masa depan, maka seharusnya media massa lebih memberi perhatian pada isu gizi buruk.

Pemerintah

Gizi buruk adalah semacam aib bagi pemerintah. Pemberitaan kasus ini di media massa, tak bisa tidak, memunculkan kesimpulan bahwa pemerintah tak sanggup menjalankan tugas, yakni menyejahterakan rakyat pada kondisi yang paling minimal. Tak perlu muluk-muluk soal ketersediaan pendidikan, akses kesehatan memadai, bahkan ketersediaan pangan pun masih dipertanyakan. Itulah sebabnya pemerintah kerap bereaksi negatif jika ada pemberitaan tentang gizi buruk. Ibaratnya, buruk muka cermin dibelah.

Reaksi yang negatif bukan hanya muncul di zaman orde baru. Pemerintahan di zaman sekarang, yang katanya pemerintah sudah lebih reformis, juga bersikap serupa. Kasus kelaparan di Yahukimo, Papua, beberapa waktu lalu, misalnya, disikapi oleh pejabat dengan kalimat klise "Media hanya membesar-besarkan masalah".

Tanggapan negatif dari pemerintah tentu saja tidak menyelesaikan persoalan. Alih-alih mendatangkan simpati, media massa justru akan semakin mendapatkan peluru untuk memberitakan sikap negatif pemerintah. Walhasil, pada gilirannya, solusi yang sebenarnya dibutuhkan justru tidak mengemuka.

Memang, persoalan gizi buruk cukup kompleks. Berbeda dengan demam berdarah yang bisa meledak dalam satu-dua bulan, gizi buruk adalah persoalan laten yang telah mengendap bertahun-tahun. Ketidakadilan struktural, kesulitan ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpekaan petugas, terlibat di sini.

Oleh karena itu, penanganan gizi buruk juga membutuhkan strategi yang komprehensif. Tak cukup hanya dengan pertolongan pertama, misalnya bagi-bagi susu untuk balita, tetapi harus melibatkan berbagai pihak. Pendidikan gizi, keterlibatan masyarakat dalam menjaga status gizi komunitas terdekat, adalah hal yang terutama harus ditingkatkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat

Peran LSM tak bisa diingkari dalam penanganan gizi buruk. Koalisi Indonesia Sehat, misalnya, menggelar berbagai program pemberantasan gizi buruk di daerah-daerah. Hal serupa juga dilakukan ratusan LSM di seantero penjuru Indonesia.

Persoalannya, apa yang dilakukan LSM kerap kali hanya tersimpan di lemari arsip kantor LSM itu sendiri. Jarang ada laporan yang komprehensif sehingga menarik perhatian media massa. Kalau pun ada, biasanya laporan terlalu bersifat teknis, penuh angka-angka yang tidak perlu, bersifat normatif, dan justru hanya menempatkan manusia –pelaku program—hanya sebagai pelengkap.

Walhasil, masyarakat tidak mendapat informasi memadai tentang langkah-langkah yang telah digelar dalam memerangi gizi buruk. Padahal, mungkin saja apa yang dilakukan LSM di lapangan bisa menjadi inspirasi bagi daerah dan orang lain untuk melakukan langkah serupa.

Sebetulnya, persoalan yang sama juga dihadapi oleh pemerintah. Dinas Kesehatan di lapangan juga tak kalah sering menggelar program inovatif, dengan melibatkan masyarakat, dalam upaya memerangi gizi buruk. Namun, berhubung kurangnya komunikasi yang dikemas menarik, media massa melewatkan kesempatan untuk meliput upaya-upaya positif ini.

Perlu juga diingat bahwa dalam jurnalisme konvensional berlaku adagium "bad news is a good news". Kejadian buruk selalu bernilai berita tinggi ketimbang berita yang baik. Meskipun, harus dicatat, tak sedikit juga media yang selalu berkembang dan berusaha lebih positif dengan menampilkan berita-berita yang inspiratif.

Mengingat berbagai hal di atas, mengemas sebuah berita untuk diberikan kepada media massa adalah tantangan tersendiri. Aktivis LSM, dan juga pejabat pemerintah, harus pintar-pintar mengelola isu. Terlebih jika diingat bahwa gizi buruk adalah persoalan lama, hampir tak ada aspek kebaruan dalam teknologi penanganan dan pengobatan. Jadi, satu-satunya alternatif adalah dengan mengemas informasi kegiatan Anda dengan baik, akurat, kreatif, dan atraktif.

Sebisa mungkin, hindarilah menampilkan pejabat formal dengan pose, upacara, dan komentar normatif yang menjemukan. Sebagai alternatif, tampilkan tokoh-tokoh lokal. Umpamanya, ibu rumah tangga yang menjadi relawan posyandu, pak lurah yang punya ide-ide brilian, atau bidan yang dengan riang bekerja di daerah terpencil. Mereka inilah yang justru menjadi motor pembaruan, menggerakkan keinginan masyarakat untuk terlibat, menuju perbaikan status gizi nasional.

Tentu saja, agar bisa menampilkan berita dan tokoh-tokoh lokal yang inspiratif, LSM, media, pemerintah perlu bekerja lebih keras. Anda, dan kita semua, wajib terjun langsung menyerap aspirasi dan dinamika masyarakat. Tempatkanlah masyarakat –manusia—sebagai subyek utama perubahan, jangan posisikan masyarakat hanya sekadar statistik.

**) Oleh Mardiyah Chamim, Redaktur Tempo, dalam Seminar
Sehari Kemitraan dalam Mengatasi Masalah Gizi di
Indonesia, Jakarta, 15 Februari 2007*